

**SUBJEKTIVASI FASILITATOR *GOVERNMENTALITY*
DALAM PRAKTIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT**



TESIS

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memperoleh Sebagian Syarat
Gelar Magister Sosial (M.Sos)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Oleh:
Uci Ningsih
24207021003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Uci Ningsih 24207021003 Subjektivasi Fasilitator Governmentality Dalam Praktik Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bangka Barat. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai kebijakan dan program sosial telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensional. Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya memberi dukungan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui pendampingan fasilitator sebagai penghubung kebijakan negara dan realitas sosial masyarakat miskin. Dalam praktiknya, fasilitator tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membina kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial penerima manfaat melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan komitmen pendidikan dan kesehatan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Metode dalam pengambilan data menggunakan sumber data primer dan skunder yakni wawancara, dokumentasi, observasi. Penelitian ini menggunakan teori *governmentality* yang dikemukakan oleh Michel Foucault untuk memahami bagaimana kekuasaan modern bekerja secara halus melalui mekanisme pembinaan, pengaturan diri, dan normalisasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitator PKH berada dalam posisi ambivalensi di satu sisi sebagai pendamping sosial yang membina dan memberdayakan, di sisi lain sebagai pengelola kepatuhan yang memastikan kewajiban administratif KPM terpenuhi. Praktik pendampingan seperti Family Development Session (FDS), monitoring komitmen pendidikan dan kesehatan, serta pencatatan kepatuhan menjadi instrumen pembentukan subjek yang patuh dan mandiri. Relasi antara fasilitator dan KPM memperlihatkan adanya negosiasi kekuasaan antara tuntutan kebijakan yang bersifat teknokratis dengan realitas sosial masyarakat di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak

hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial bersyarat, tetapi juga sebagai mekanisme *governmentality* yang membentuk subjektivitas orang miskin melalui teknik pengaturan diri, pembinaan moral, dan rasionalitas kebijakan. Dengan demikian, fasilitator berperan sebagai agen kebijakan sekaligus aktor sosial yang menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: *Governmentality*, Fasilitator PKH, Subjektivasi, Kemiskinan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Ningsih

NIM : 24207021003

Jenjang : Magister Sosiologi (S2)

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan bahwa tesis “Subjektivasi Orang Miskin: Governmentality Dalam Praktik Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Barat” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang di tulis oleh orang lai sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi ini atau perguruan tinggi lainnya kecuali pada bagiab-bagian yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 April 2026

Saya yang menyatakan,



Uci Ningsih
24207021003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Ningsih
NIM : 24207021003
Jenjang : Magister
Program Studi : Sosiologi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik Islam Negeri Sunan Kalijaga maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir yang telah ditulis, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam negeri Sunan Kalija

Yogyakarta, 7 April 2026



Uci Ningsih
24207021003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Tesis

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa, menguraikan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Uci Ningsih
NIM : 24207021003
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Sosiologi

Telah diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Sosiologi.

Harapan saya semoga saudara tersebut dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tesisnya dalam sidang munaqosah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 April 2026

Pembimbing



Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D
NIP, 197803152011011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1912/Un.02/DSH/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : **SUBJEKTIVASI FASILITATOR GOVERNMENTALITY DALAM PRAKTIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UCI NINGSIH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 24207021003
Telah ditujikan pada : Kamis, 30 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Achmad Uzair, S.I.P., M.A, Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6a1ce9783826c



Penguji I

Dr. Andri Rosadi, M.Hum
SIGNED

Valid ID: 6a1522a449a1



Penguji II

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6a13e9d7573fa



Yogyakarta, 30 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1e2a0826c11

MOTTO

Tidak ada Mimpi Yang terlalu Tinggi dan Tidak ada Mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.

(Maudi Ayunda)

Tubuhmu mendengar semua yang dikatakan pikiranmu, maka yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan dan segala yang telah dilakukan. Dengan bermodal yakin kamu akan mencapai apa yang ingin kamu lakukan

(Penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam penulisan tesis ini kecuali lembar persembahan, tesis ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Amir dan Ibu Arita) dan Kakakku Dr. Alpendi. S.Pd., M.Pd. serta keluarga besar yang selalu memberikan support, do'a, kasih sayang, motivasi, serta dukungannya dalam menyelesaikan perkuliahan. Kepada diri saya sendiri yang selalu berdoa dan berusaha setiap proses penulisan tesis ini hingga selesai.

Dan kepada

*Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunianya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul Subjektivasi Orang Miskin: Governmentality Dalam Praktik Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Magister Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Ag., M.phil., ph. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Ibu Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

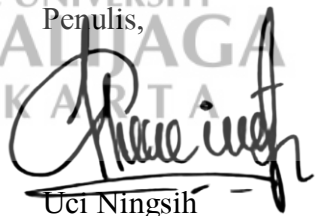
3. Bapak Dr. Phil. Ahmad Norma Permata., S.Ag., M.A. selaku ketua prodi Magister Sosiologi yang telah memudahkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan program studi.
4. Bapak Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan serta motivasi selama proses bimbingan dengan sabar sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Dinas Sosial Bapak Achmad Nursyandi, S.Far.,Apt., MPH Kabupaten Bangka Barat yang telah memberikan izin penelitian.
6. Segenap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bangka Barat yang telah membantu selama proses penelitian.
7. Kedua orang tua, saudara dan keluarga besar yang telah menjadi support sistem positif selama penyelesaian studi.
8. Seluruh dosen dan karyawan program studi Magister Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat selama pendidikan.
9. Teman-teman dari bagian perjalananku, Nurul Hidayah Siregar, Indhira Resky Imandari, Ika Fatmawati, yang telah menghabiskan masa akhir perkuliahan bersama, mengukir kenangan dan memberi pelajaran berharga, saling mengenal dan bertukar cerita. Semoga hal indah selalu menyertai kita dimanapun dan dengan siapapun.

10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan tesis ini.
11. *Las but not least*, terimakasih untuk diriku sendiri yang berhasil mengalahkan bagian diriku yang lain, melawan kemalasan serta teman-temannya. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana layaknya, baik dari segi bahasa maupun materi yang tertuang di dalamnya. Besar harapan penulis tesis ini dapat berguna untuk menambah wawasan baru dan membuka cangkrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian.

Akhirnya, Penulis menyadari, bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan tesis ini kedepannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk semuanya.

Wassalaamu'alaikum.w.w

Yogyakarta, 7 April 2026
Penulis,



Uci Ningsih
24207021003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori.....	25
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sumber dan Jenis Data	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Teknik Analisa Data.....	46
5. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Sistematika Penulisan.....	50
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum	53
1. Kondisi Geografis.....	54
2. Kondisi Demografis.....	58
3. Jumlah Penduduk.....	64
4. Kondisi Sosial Ekonomi	66

5. Sektor Pendidikan.....	69
6. Infrastruktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	73
7. Struktur Pemerintahan Daerah.....	77
B. Profil program Keluarga Harapan	80
1. Sejarah Kantor Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)	80
2. Visi Misi Program Keluarga Harapan (PKH).....	85
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	87
4. Persyaratan Menjadi Fasilitator PKH.....	89
5. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)	91
6. Indikator keluarga Miskin.....	94
7. Tranformasi Kepesertaan	98
8. Fasilitator Pendamping PKH Kabupaten Bangka Barat.....	99
9. Jumlah KPM PKH dan Dinamika Proses Graduasi	103
BAB III HASIL PENELITIAN.....	107
A. Dinamika Peran Fasilitator PKH di Lapangan	107
1. Peran Yang Diharapkan dari Fasilitator PKH (<i>Expected Role of Fasilitator</i>)	108
2. Peran Fasilitator dalam Praktik Lapangan (<i>Roles in Practice</i>)	124
3. Perbedaan Pendekatan Fasilitator Laki-laki dan Perempuan dalam Pendampingan PKH.....	143
B. Praktik Pendampingan dalam Pembentukan Perilaku dan Kesadaran KPM.....	147
1. Pendampingan dan Tantangan Pemahaman KPM ..	149
2. Kolaborasi dengan Stakholder dalam Pendampingan	153
3. Perubahan Perilaku KPM sebagai Indikator Keberhasilan	155
C. Strategi Fasilitator Dalam Mengelola Kepatuhan dan Resistensi.....	157
1. Pendampingan Edukatif dan Motivasi Persuasif	161
2. Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Fasilitator dalam Struktur PKH.....	166

3. Penyesuaian Komunikasi dan Metode Edukasi.....	172
D. Relasi Kekuasaan fasilitator dan KPM dalam Implementasi Program.....	174
1. Kekuasaan Struktural dan Kerangka Kebijakan	185
2. Kekuasaan Pengetahuan dan Kategori Administratif.....	187
3. Kekuasaan Dalam Praktik Diskresi	190
4. Negosiasi Kekuasaan dan Pembentukan Subjek Kebijakan.....	193
BAB IV SUBJEKTIVASI FASILITATOR	
<i>GOVERNMENTALITY</i> DALAM PRAKTIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT.....	
	198
A. Pemahaman Fasilitator PKH Dalam Memahami Tugas Serta Perannya.....	200
1. Fasilitator Sebagai Instrumen Kekuasaan dan Perpanjangan Rasionalitas Pemerintah.....	204
2. Ambivalensi Peran Pendamping Sosial dan Pengelola Kepatuhan.....	211
B. Pemaknaan Fasilitator Terhadap Praktik Program Dalam Membentuk Kesadaran dan Perilaku Penerima Manfaat.....	214
1. Teknik Pengaturan Diri sebagai Strategi Pengelolaan Kemiskinan.....	215
2. Pembinaan Moral dan Sosial sebagai Mekanisme Normalisasi.....	218
C. Negosiasi Relasi Kuasa antara Kebijakan Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat.....	222
1. Fasilitator sebagai Mediator Kebijakan dan Realitas Sosial.....	227
2. Fasilitator Sebagai Agen Perubahan dalam Pembentukan KPM.....	231
3. Fasilitator sebagai Edukator dalam Praktik Pembinaan Moral dan Sosial.....	232

BAB V PENUTUP.....	236
A. Kesimpulan.....	236
B. Saran.....	244
DAFTAR PUSTAKA.....	246
LAMPIRAN.....	257
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	259



DAFTAR SINGKATAN

BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
FDS	: <i>Family Development session</i>
KPM	: Keluarga penerima Manfaat
PKH	: Program Keluarga Harapan
P2K2	: Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
PKW	: Pusat Kegiatan Wilayah
RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RT/RW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
UPPKH	: Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Wawancara.....	41
Tabel 1. 2 Hasil Observasi	44
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat	60
Tabel 2.2 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Dikdas).....	71
Tabel 2.3 Penyelenggara Rumah Sakit Di Kabupaten	77
Tabel 2.4 Komponen Bantuan PKH.....	92
Tabel 2.5 Kriteria Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH	94
Tabel 2.6 Indikator Kondisi Sosial Ekonomi.....	96
Tabel 2.7 Data Pendamping PKH Kab.Bangka Barat ...	100
Tabel 2.8 Jumlah KPM Aktif dan Data Graduasi PKH di Kabupaten Bangka Barat.....	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Provinsi kepulauan Bangka Belitung	54
Gambar 2.2 Letak Geografis Kabupaten Bangka Barat.....	55
Gambar 2.3 Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	65
Gambar 2.4 Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat	66
Gambar 2. 5 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat.....	75
Gambar 2. 6 Sekretariat UPPKH Kab. Bangka Barat	82
Gambar 2.7 Struktur Organisasi UPPKH Kab. Bangka Barat.....	84
Gambar 3. 1 Kondisi Jalan Wilayah Dampungan	125
Gambar 3. 2 Verifikasi kondisi rumah KPM	129
Gambar 3. 3 Kunjungan fasilitator PKH kepada KPM yang sedang menjalani perawatan	133
Gambar 3. 4 Proses pendampingan dan edukasi fasilitator Program	145
Gambar 3. 5. Pertemuan fasilitator PKH bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	152
Gambar 3. 6 Pertemuan P2K2 dengan KPM	163
Gambar Gambar 3. 7 Interaksi fasilitator PKH dengan KPM dalam proses pendampingan.	176
Gambar 3. 8 Fasilitator PKH melakukan kunjungan rumah KPM	179
Gambar 3. 9 KPM Melakukan Verivikasi dan Pemuktahiran Data.....	188

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Riset Fakultas Sosial dan Humaniora. 257

Lampiran 2. Surat Balasan Riset Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Barat 258



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai kebijakan dan program sosial telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2024 mencapai 9,03 persen, yang setara dengan sekitar 25,22 juta orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 9,36 persen pada Maret 2023. Hal ini terus berlanjut di bulan Maret 2025, dengan angka kemiskinan kembali menurun menjadi 8,47 persen.¹ Meski begitu, perbedaan antara pedesaan dan perkotaan masih terasa jelas. Pada bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mencapai 11,79 persen, yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di kota yang hanya 7,12 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah

¹ Pengukuran Kemiskinan Oleh Badan Pusat Statistik Menggunakan Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*), Yaitu Melalui Perhitungan Garis Kemiskinan Yang Terdiri Dari Garis Kemiskinan Makanan Dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Penurunan angka kemiskinan antarperiode dapat dipengaruhi oleh perubahan komposisi konsumsi, inflasi, pembaruan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maupun penyesuaian metodologi penghitungan.

kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal banyaknya orang yang miskin, tetapi juga terkait dengan perbedaan akses dan peluang yang ada di antara daerah-daerah.²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan diperlukan strategi yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat.³ Dalam pandangan yang lebih luas, kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai kurangnya sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai dampak dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang serta kebijakan pemerintah yang belum cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, peran para pelaksana di lapangan, seperti fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), sangat penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga tindakan yang diambil lebih tepat sasaran dan bisa terus berlangsung.⁴

Berbicara soal kemiskinan di Indonesia sendiri masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Tidak dapat dipungkiri

² Badan Pusat Statistik (BPS), "Persentase Penduduk Miskin, Akses 11 Februari," 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>.

³ BPS, "Jumlah Pendudukan Kabupaten Bangka Barat," Badan Pusat Statistik Bangka Barat, 2022, <https://bangkabaratkab.bps.go.id/>.

⁴ Savetlana Shirley et al., *Ilmu-Ilmu Teknik: Kebencanaan 2019*. Lampung: UPT Perpustakaan Universitas Lampung., ed. Shirley Savetlana et al. (Bandar Lampung: UPT Perpustakaan Universitas Lampung, 2019).

upaya-upaya penanggulangan direncanakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi upaya penanggulangan tersebut sering kali tidak menghasilkan suatu penyelesaian seperti yang diharapkan. Sehingga belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut mendorong akan perlunya suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang baru dengan melihat akar dari permasalahan kemiskinan. Menanggapi pernyataan di atas, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan.⁵

Upaya perlindungan dan pengentasan kemiskinan tidak pernah terpisahkan dalam proses pembangunan dalam sebuah negara. Selama ini, kemiskinan banyak diatasi oleh bantuan-bantuan sosial dan program pembangunan yang bersifat *top-down*, yang menempatkan masyarakat miskin sebagai objek penerima bantuan. Seiring berkembangnya kebijakan- kebijakan sosial di Indonesia, terjadi perubahan menuju pendekatan perlindungan sosial sebagai inisiatif yang baik dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pendapatan masyarakat, di mana masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan yang perlu diberdayakan.⁶ Pergeseran ini tercermin dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari kebijakan

⁵ Arinda Riskiana Putri, "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora" (2023).

⁶ Arif Wibowo and Sari Viciawati Machdum, *Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin* (Yogyakarta: Kilau Kata, 2023), 1–4.

bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka pelayanan bantuan sosial, program seperti PKH dipandang sebagai instrumen intervensi sosial yang mengintegrasikan transfer ekonomi dengan penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti ketepatan sasaran, validitas data, serta koordinasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.⁷

Selain itu, fenomena kemiskinan juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya serta kurangnya percaya masyarakat kepada kemampuannya. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, ketidakmerataan pembangunan, serta ketergantungan ekonomi terhadap sektor informal yang memperburuk kondisi masyarakat miskin. Upaya mengatasi kemiskinan tidak terlepas dari perubahan kebijakan dan arah pembangunan nasional yang terus berkembang. Salah satu program utama pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).⁸

⁷ Aswar Annas, Resky Amalia, and Nursafitra M, *Pelayanan Bantuan Sosial: Social Assistance Services* (Jakarta: Chakti Pustaka Indonesia, 2022), 45–48.

⁸ Erlian Dwisnu, Diherna Yolanda, and Kecamatan Pino, “Implementasi Program Keluarga Harapan Pkh Dalam Menanggulangi

Bantuan program keluarga harapan (PKH) ini diberikan kepada beberapa kelompok, seperti ibu hamil, anak-anak usia dini, siswa SD hingga SMA, lansia, dan orang dengan disabilitas berat. Program keluarga harapan (PKH) tidak hanya memberikan uang tunai, tetapi juga membantu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya dengan didampingi oleh fasilitator di lapangan. Berbeda dengan program lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako yang fokus pada pemberian bantuan pangan, atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung tanpa syarat, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dengan syarat tertentu dan didampingi oleh beberapa fasilitator PKH. Tujuannya dari program ini untuk memutus siklus kemiskinan secara lebih berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, program keluarga harapan (PKH) menekankan gabungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sementara program-program lainnya umumnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok atau penstabilan perekonomian dalam jangka waktu yang lebih singkat.⁹

Kemiskinan Di Desa Batu Bandung,” *JURNAL STIA BENGKULU: Committe to Administration for Education Qualit* 11, no. 2 (2025): 145–60.

⁹ Baihaqi, *Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan (Dari Teori Hingga Empirik)* (Jawa Barat: Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 4–7.

Berbagai upaya penanggulangan percepatan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat yang kemudian dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁰

Program keluarga harapan (PKH) ini merupakan bentuk *conditional cash transfer* (bantuan sosial bersyarat). Karena bantuan yang diberikan disertai dengan kewajiban tertentu bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan. Peraturan yang telah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi

¹⁰ Evan Notatema Hia, Matias Siagian, and Nurman Achmad, "Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan Implementation," *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 128–39, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>.

beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.¹¹

Bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Melalui mekanisme ini, keluarga penerima manfaat (KPM) diharuskan memenuhi komitmen tertentu seperti memastikan anak bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan demikian, PKH tidak hanya menyalurkan bantuan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku sosial.¹²

Namun demikian, setelah lebih dari satu dekade berjalan, program keluarga harapan (PKH) masih menghadapi sejumlah tantangan. Di daerah Bangka Barat, tingkat kemiskinan menunjukkan pola yang berubah-ubah. Pada tahun 2023, angka tersebut mencapai 2,71, tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,59. Namun, pada tahun 2025 angka tersebut kembali naik menjadi 2,92, yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dinamika ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah orang

¹¹ Asti Yuliani, Zaenal Abidin, and Sri Kadarsi, *Program Keluarga Harapan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Jambi: CV Meriva Media, 2024), 41–50.

¹² Afwa Khoiriyah et al., “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).

miskin belum benar-benar berjalan stabil dan masih menghadapi masalah di tingkat daerah.¹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program mengatasi kemiskinan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah yang dibuat di pusat, tetapi juga pada cara penerapannya yang tepat sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peran fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting karena mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan di lapangan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kenyataan hidup masyarakat yang kurang mampu. Fasilitator memastikan bahwa program tidak hanya berjalan secara administratif saja, tetapi juga benar-benar dipahami, diterima, dan dikerjakan dengan baik oleh keluarga yang mendapatkan manfaat.¹⁴

Oleh karena itu, fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial masyarakat di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran, kemandirian, dan disiplin sosial di kalangan

¹³ Badan Pusat Statistik, "Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat, 15 Februari 2025, Pukul 12.09," n.d., <https://bangkabaratkab.bps.go.id/id>.

¹⁴ Anwar Hakim Darajat and Septa Ekasari, "Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)," *Jurnal Translitera* 10, no. 1 (2021): 8–14, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

keluarga penerima manfaat. Dalam menjalankan fungsi ini, fasilitator sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kapasitas personal, serta modal sosial yang dimiliki, seperti jaringan, kepercayaan, dan legitimasi di mata masyarakat. Peran ini menempatkan fasilitator dalam posisi yang unik. Mereka bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan agen sosial yang menerjemahkan kebijakan negara ke dalam praktik keseharian masyarakat miskin.¹⁵

Namun, posisi fasilitator di lapangan tidak lepas dari dinamika kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan antara kebijakan dan kondisi sosial lokal. Di satu sisi, fasilitator harus memastikan program berjalan sesuai pedoman administratif yang ditetapkan pemerintah.¹⁶ Di sisi lain, mereka juga harus peka terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang mereka dampingi. Ketidakseimbangan antara tuntutan birokratis dan kebutuhan riil di lapangan sering menimbulkan dilema peran yang kompleks. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui mekanisme pendampingan sosial. Pemahaman tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori *governmentality* yang diperkenalkan oleh Michel Foucault,

¹⁵ Pierre. Bourdieu, *The Forms of Capital in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (Westport: CT: Greenwood, pp., 1986), pp. 241

¹⁶ Agus Zakaria Ansori, *Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori, Dan Pemikiran Islam* (Mataram: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2019), 61–62.

yakni konsep yang melihat kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui paksaan, melainkan melalui pengaturan kesadaran individu agar mereka secara sukarela mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tujuan kebijakan.¹⁷

Melalui kegiatan seperti *Family Development Session* (FDS) dalam kegiatan pertemuan rutin antara fasilitator dan keluarga penerima manfaat, fasilitator berperan membentuk kesadaran masyarakat agar mampu mengatur kehidupannya sendiri secara mandiri dan produktif.¹⁸ Akan tetapi dalam praktiknya fasilitator sering menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan kondisi lapangan. Tantangan ini berpengaruh terhadap persepsi dan cara mereka menerjemahkan kebijakan di lapangan. Kegiatan *Family Development Session* ini diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat terutama bagi orang tua agar bisa menumbuhkan kemandirian dalam mengambil keputusan dalam menentukan masa depannya sendiri dan keluarga sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.¹⁹

¹⁷ Sulistya Wardaya and Anni Suprapti, 'Kemiskinan Dalam Perspektif Sosiologi', *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2.1 (2018), 71–82. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3121>.

¹⁸ Moch.Fery Dwi Cahyono, *Potret Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 130–32.

¹⁹ Iis Arfiyanti, TJ Raharjo, and A Yusuf, 'Family Development Session Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9.1 (2020), 57–67. Arfiyanti, Raharjo, and Yusuf.

Dalam hal ini, hubungan antara fasilitator dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional dan sosial. Fasilitator sering berhadapan dengan tantangan seperti perubahan regulasi kebijakan, tekanan untuk memenuhi target, serta beragam hambatan sosial sehingga tuntutan pelaksanaan program tidak sejalan dengan kondisi nyata masyarakat. Misalnya, di beberapa daerah, keterbatasan sarana kesehatan atau pendidikan membuat keluarga miskin kesulitan memenuhi kewajiban program, sehingga fasilitator harus mencari solusi adaptif di lapangan. Di sisi lain, mereka juga berperan dalam membangun kepercayaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan mau berupaya memperbaiki kehidupannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitator berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus agen sosial.²⁰

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik fasilitasi sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, melainkan juga menjadi bentuk pengaturan sosial yang melibatkan dimensi kekuasaan dan pembentukan perilaku. Melalui interaksi sehari-hari, fasilitator menjalankan bentuk kekuasaan yang halus dengan cara mengatur masyarakat

²⁰ Aulia Hadi et al., *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, Dan Pola Kerentanan Sosial*, Gadjah Mada University Press. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2021), 113–14.

tanpa paksaan, tetapi melalui proses pembinaan, internalisasi nilai, dan bimbingan moral. Dengan demikian, memahami persepsi dan praktik fasilitator program keluarga harapan (PKH) menjadi penting untuk melihat bagaimana kekuasaan pemerintah bekerja di tingkat mikro melalui kebijakan sosial yang tampak teknokratis namun sarat makna politis dan sosial.²¹

Untuk memahami persepsi fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penting dan melihat sejauh mana kebijakan yang dijalankan secara efektif. Persepsi mereka merefleksikan bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik sosial sehari-hari, termasuk bagaimana nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan kesejahteraan diinternalisasi oleh masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan inilah penelitian berupaya menelaah bagaimana kekuasaan pemerintah bekerja melalui praktik kekuasaan yang dilakukan oleh fasilitator program keluarga harapan (PKH) dalam menegosiasikan kebijakan dengan realitas.

Sebagian besar penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini masih berfokus pada efektivitas program dan dampak ekonomi terhadap penerima manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan angka kemiskinan, serta pencapaian target administratif.

²¹ Friedrich Ebert Stiftung, *Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta, 2024), 63–65.

Namun, dimensi kekuasaan, kesadaran sosial, dan makna yang dijalankan oleh para fasilitator sebagai pelaksana kebijakan belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, fasilitator merupakan aktor kunci yang menegosiasikan kebijakan dengan realitas sosial masyarakat, dan cara-cara mereka memaknai peran serta kekuasaan dapat memengaruhi keberhasilan program secara signifikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana fasilitator PKH memahami dan memaknai tugas serta perannya dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana fasilitator PKH memaknai praktik program dalam membentuk kesadaran dan perilaku penerima manfaat?
3. Bagaimana fasilitator menegosiasikan relasi kuasa antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada diatas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) memaknai dan menjalankan tugas serta

perannya dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, sekaligus menelaah praktik program dalam membentuk kesadaran dan perilaku penerima manfaat sebagai bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus melalui pembinaan moral, pembentukan kesadaran, dan pengaturan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana fasilitator menegosiasikan relasi kuasa antara kebijakan yang bersifat administratif dengan kebutuhan sosial masyarakat, termasuk strategi adaptasi dan penyesuaian yang mereka lakukan dalam menghadapi dinamika sosial ketika berada dan berhadapan langsung di lapangan. Serta memahami persepsi dan praktik fasilitator program keluarga harapan (PKH) menjadi penting untuk melihat bagaimana kekuasaan pemerintah bekerja di tingkat mikro melalui kebijakan sosial yang tampak teknokratis namun sarat makna politis dan sosial. Melalui pemahaman inilah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran strategis fasilitator sebagai agen sosial sekaligus pelaksana kebijakan yang menjembatani kepentingan pemerintah dengan realitas kehidupan keluarga penerima manfaat (KPM).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat tersebut secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosial dan kebijakan publik. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana konsep *governmentality* dan relasi kekuasaan bekerja dalam praktik implementasi kebijakan sosial, khususnya pada konteks Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH). Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran fasilitator sosial sebagai aktor yang tidak hanya menjalankan kebijakan negara, tetapi juga menegosiasikan nilai, makna, dan strategi dalam menghadapi dinamika sosial di lapangan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pengkajian diperoleh penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus menegaskan posisi penelitian ini dalam kerangka kajian ilmiah yang lebih luas. Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pengentasan kemiskinan, serta peran fasilitator telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, namun sebagian besar masih

berfokus pada aspek ekonomi dan efektivitas program, bukan pada dimensi persepsi fasilitator dan relasi kekuasaan di balik kebijakan sosial tersebut.

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2025) dalam *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat*” menyoroti efektivitas implementasi PKH dari sisi kebijakan dan pelaksana di lapangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kapasitas dan profesionalitas fasilitator PKH. Fasilitator berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat, tetapi mereka sering dihadapkan pada kendala seperti beban administrasi tinggi, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan sumber daya lokal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas PKH tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada bagaimana fasilitator mampu menerjemahkan nilai-nilai kebijakan ke dalam tindakan nyata di masyarakat.

Meskipun memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan PKH secara nasional, penelitian Khoiriyah dkk. (2025) masih menitikberatkan pada evaluasi administratif dan capaian program, belum menggali secara mendalam dimensi sosial dan politik yang membentuk cara fasilitator menjalankan perannya. Dalam penelitian tersebut,

fasilitator dipandang sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai subjek yang menafsirkan dan menegosiasikan makna kebijakan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, aspek kekuasaan, resistensi, dan pembentukan kesadaran sosial yang bekerja dalam hubungan antara fasilitator dan masyarakat penerima manfaat belum sepenuhnya terungkap.

Berbeda dengan penelitian Khoiriyah, penelitian ini menempatkan fasilitator sebagai fokus utama dan menganalisis peran mereka melalui perspektif *governmentality* Michel Foucault. Penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui seberapa efektif fasilitator menjalankan tugasnya, tetapi juga bagaimana mereka menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan negara yang bekerja secara halus melalui praktik pendampingan sosial. Dengan menelaah persepsi dan pengalaman subjektif fasilitator, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kebijakan negara diinternalisasi, dinegosiasikan, bahkan mungkin ditafsirkan ulang dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dan memperdalam temuan dengan menghadirkan analisis yang lebih kritis terhadap relasi kekuasaan, praktik sosial, dan pembentukan subjek dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.²²

²² Khoiriyah et al., "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat."

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Anis Aprila (2021) berjudul *“Persepsi Masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Kelurahan Sukaraja Kota Prabumulih”* menyoroti persepsi penerima manfaat terhadap PKH dalam meningkatkan taraf hidup. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat penerima PKH tergolong positif, dengan capaian utama berupa peningkatan taraf hidup, pengurangan beban ekonomi, dan pembentukan kemandirian. Meskipun demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada pandangan masyarakat penerima manfaat, belum menyentuh bagaimana pelaksana program atau fasilitator menafsirkan dan menjalankan kebijakan di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan penting dalam fokus kajiannya yaitu subyek penelitian yang diunggah meneliti persepsi masyarakat penerima PKH terhadap program tersebut dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara tesis ini mengkaji persepsi pengelola PKH dari sudut pandang sosiologi politik dan kebijakan, Pendekatan perspektif skripsi berfokus pada persepsi penerima manfaat PKH tanpa mengaitkannya langsung dengan perspektif politik atau kebijakan sedangkan tesis ini menambahkan perspektif sosiologi politik dan kebijakan, yang memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai peran pemerintah, pengelola, dan implikasi kebijakan PKH

dalam pengentasan kemiskinan secara struktural, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Adapun kesamaan kedua penelitian ini berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu: Tema Utama Pengentasan Kemiskinan: Kedua penelitian sama-sama membahas peran PKH sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, Topik Persepsi terhadap Program PKH: keduanya menunjukkan persepsi sebagai aspek sentral, baik itu dari penerima manfaat (masyarakat), Tujuan Meningkatkan Taraf Hidup: penelitian kedua ini mengidentifikasi peningkatan taraf hidup sebagai tujuan utama PKH.²³

Ketiga sebagaimana yang ditulis dalam karya ilmiah Asmul Fauzi Harahap dalam artikelnya berjudul “*Persepsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)*” yang dimuat di *YUME: Journal of Management* meneliti hubungan antara persepsi penerima PKH, kinerja pendamping, dan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padangsidempuan. Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM-PLS), penelitian ini menemukan bahwa PKH berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Namun, hasil menarik muncul ketika diketahui bahwa kinerja pendamping justru memoderasi pengaruh tersebut secara negatif. Hal ini

²³ Anis Aprila, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Kelurahan Sukaraja Kota PRABUMULIH’, 2021.

menunjukkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas dan peran pendamping dalam pelaksanaannya.

Meskipun menyinggung peran pendamping, penelitian ini belum menelaah lebih jauh bagaimana fasilitator memaknai peran mereka dalam sistem kebijakan sosial. Harahap lebih menitikberatkan pada hubungan antarvariabel dan tidak mengulas secara kualitatif pengalaman subjektif para fasilitator dalam menghadapi tantangan lapangan. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan ini untuk memperluas arah kajian tersebut dengan menggali persepsi fasilitator PKH melalui pendekatan sosiologi politik.²⁴

Yang keempat penelitian yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung*” ditulis oleh Hikmah Wati. Di dalamnya terdapat permasalahan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) merasa tidak mendapatkan bimbingan dan pemberdayaan, melainkan hanya merasa tergantung pada program PKH, sehingga ketika terjadi keterlambatan pencairan dana, masyarakat akan protes dan merasakan kebutuhan yang sangat mendesak. Menurut teori Sri Najiati dan rekan-rekan dalam

²⁴ Asmul Fauzi Harahap, ‘Persepsi Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentas Kemiskinan Dengan Kinerja Pendamping Sebagai Variabel Moderasi Studi Emperis Di Kota Padangsidempuan’, *YUME : Journal of Management*, 7.2 (2024), 333–45.

Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, terdapat empat prinsip yang penting untuk keberhasilan program pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah untuk memaksimalkan ketulusan hati dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan semua kegiatan yang merupakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai. Dinas Sosial juga perlu terus memperbarui data sehingga masyarakat yang sudah mandiri dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dikeluarkan dari data PKH, agar mereka bisa berdaya dan berkarya sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada program PKH.

Penelitian Wati menyoroti pentingnya ketulusan dan tanggung jawab aparat sosial dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat. Namun, pendekatan yang digunakan masih terbatas pada tataran operasional kebijakan, tanpa menelaah dimensi kekuasaan dan rasionalitas pemerintah di balik implementasi program. Dalam konteks penelitian ini, kerangka *governmentality* digunakan untuk memperluas pemahaman tersebut dengan melihat bagaimana negara, melalui fasilitator PKH, mengatur masyarakat melalui teknik pendampingan sosial yang membentuk perilaku dan kesadaran.²⁵

²⁵ Hikmah Wati, "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung" (Universitas Muhammadiyah Metro, 2017).

Kelima Desi Pratiwi dalam penelitian yang berjudul *“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab.Lampung Timur”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam. Metode penelitian ini metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai Program keluarga harapan dalam pandangan ekonomi Islam yang dapat dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam meliputi : keadilan, tanggung jawab, dan takaful, dan digunakan untuk variabel-variabel pengukuran efektivitas seperti ketetapan saran program, sosialisasi program, tujuan program dan dampak. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah peran pendamping program keluarga harapan dalam penerima manfaat PKH yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program PKH untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih difokuskan pada kriteria pengentasan kemiskinan yang ditinjau dari segi ekonomi Islam.²⁶

²⁶ Desi Pratiwi, ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada

Ana Ni'matul Izza (2019), berjudul: “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan PKH yang ada di Desa Wonodadi dan mengetahui sejauh mana ukuran sejahtera program ini dapat mensejahterakan masyarakat Desa Wonodadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan naratif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai manfaat program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa wonodadi sudah berjalan sesuai dengan tahapan pemerintah. Manfaat program PKH terhadap pendidikan sudah dirasakan oleh para pelajar dan sangat bermanfaat bagi pendidikan.

Keterkaitan program keluarga harapan dalam Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya peran pendamping dalam menjaga kelancaran pelaksanaan PKH, tetapi belum menjelaskan secara konseptual bagaimana pendamping berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam proses *governance*. Oleh karena itu, penelitian tesis ini berusaha mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada peran fasilitator sebagai agen kebijakan dan pelaku praktik

Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur⁴ (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

kekuasaan yang membentuk subjek masyarakat miskin melalui strategi pendampingan sosial.²⁷

Adapun yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Atifa Iin, yang berjudul “*Efektivitas Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan di Kecamatan Bayat Klaten*”. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keberhasilan PKH sangat dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas pendampingan. Dalam penelitian ini, pendamping berperan sebagai fasilitator, mediator, dan advokat bagi peserta PKH. Meskipun pendamping telah menjalankan tugasnya dengan baik, keterbatasan jumlah tenaga, sarana, dan beban kerja tinggi menjadi kendala yang signifikan.

Penelitian Atifa memberikan pemahaman operasional tentang fungsi pendamping dalam konteks pelayanan sosial. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif dan belum menganalisis bagaimana kekuasaan negara dijalankan melalui mekanisme pendampingan sosial. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan melihat fasilitator sebagai bagian dari praktik *governmentality*, yakni bagaimana negara mengatur masyarakat miskin

²⁷ Ana Ni'matul Izza, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

secara halus melalui pembinaan moral dan pengawasan perilaku dalam kerangka kebijakan kesejahteraan.²⁸

Dari berbagai penelitian di atas, terlihat bahwa kajian mengenai PKH telah banyak membahas efektivitas program dan persepsi masyarakat penerima manfaat, namun masih sangat terbatas dalam menyoroti persepsi fasilitator sebagai pelaksana kebijakan. Penelitian ini berbeda karena menempatkan fasilitator PKH sebagai subjek utama analisis untuk memahami bagaimana mereka memaknai, menegosiasikan, dan melaksanakan kebijakan dalam konteks relasi kekuasaan negara dan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif *governmentality* Michel Foucault, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai praktik kekuasaan, strategi adaptasi, serta pembentukan kesadaran masyarakat dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *governmentality* yang dikemukakan oleh Michel Foucault untuk memahami cara kekuasaan berfungsi dalam masyarakat modern. Istilah *governmentality* berasal dari gabungan kata *government* yang artinya pemerintahan dan *mentality* yang berarti cara berpikir. Secara sederhana, istilah ini bisa diartikan sebagai

²⁸ Atifa Iin Dirgantari, “Efektivitas Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten” (Universitas Sebelas Maret, 2016).

cara memerintah dengan membentuk cara berpikir dan bertindak individu. Foucault juga menggambarkan *governmentality* sebagai cara untuk mengarahkan tingkah laku individu atau kelompok agar mereka bertindak sesuai dengan tujuan tertentu, tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung.²⁹

Sehingga kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai hubungan yang bersifat menghalangi atau memaksa, melainkan sebagai kekuasaan yang mampu menciptakan sesuatu. Kekuasaan berfungsi dengan membentuk subjek, menciptakan aturan, serta menghasilkan cara baru dalam memahami diri sendiri dan dunia sosial. Oleh karena itu, kekuasaan tidak hanya melarang atau menganiaya, tetapi justru menciptakan pengetahuan, identitas, dan cara-cara berinteraksi sosial tertentu yang dianggap biasa dan masuk akal.³⁰

Foucault menjelaskan bahwa di masyarakat modern, relasi kekuasaan lebih sering diterapkan melalui cara yang tidak kasar, seperti aturan, standarisasi, pengelompokan, serta penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri seseorang. Pemerintahan kini tidak hanya bekerja melalui lembaga

²⁹ Michel. Foucault, *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*. (Amherst: University of Massachusetts Press., 1988), 15–38.

³⁰ Sebastianus Geradus Duminggu, “Governmentality Kementerian Desa Pdttd Dalam Regulasi Penyaluran Bltdd,” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 6, no. 1 (2022): 15–38, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i1.173>.

negara saja, tetapi juga merambah ke berbagai kegiatan sosial sehari-hari. Ini disebut rasionalitas pemerintahan modern, yaitu cara berpikir yang menjadikan individu sebagai subjek yang mampu dan wajib mengatur dirinya sendiri.³¹ Sehingga teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana fasilitator menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengarahkan masyarakat miskin menuju bentuk kemandirian yang diinginkan kebijakan tetapi tetap sesuai dengan pedoman yang ada.

Konsep *government* menunjukkan perubahan sejarah dari relasi kekuasaan yang berlandaskan kedaulatan sering dianggap berlandaskan biopolitik. Dalam kekuasaan kedaulatan, negara bertindak dengan memerintah melalui aturan dan hukuman. Sebaliknya, dalam *governmentality* kekuasaan bekerja dengan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan seseorang secara sukarela melakukan tindakan sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan.³² Kekuasaan kini tidak lagi memaksa dari luar, melainkan memandu dari dalam dengan cara membentuk kesadaran dan subjektivitas seseorang. Oleh karena itu,

³¹ Wahyudi Kumorotomo and Yuyun Purbokusumo, *Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 191.

³² Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge* (New York: Harper & Row Publisher, 1976), 66–67.

setiap tindakan pemerintah selalu memiliki tujuan spesifik serta metode pengendalian yang terkesan logis digunakan.³³

Dengan demikian *governmentality* bukanlah pemerintahan langsung, melainkan proses pembuatan subjek. Dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga menjadi subjek yang menjalankan kekuasaan tersebut terhadap dirinya sendiri. Itulah sebabnya *governmentality* menjadi bentuk kekuasaan yang sangat efektif karena berjalan dengan cara yang halus, tidak terlihat, dan diterima oleh orang-orang sebagai bagian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Secara konseptual, kerangka *governmentality* dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui tiga dimensi utama:

1. Teknik Pengaturan Diri (*Self-Governing Techniques*)

Dimensi pertama dalam *governmentality* adalah cara mengatur diri sendiri. Menurut Foucault, kekuasaan modern berjalan dengan mendorong individu untuk mengelola diri mereka sendiri. Individu kini tidak hanya diperintah dari luar, tetapi dibimbing agar bisa mengawasi tingkah lakunya, mengevaluasi tindakannya, serta menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Teknik pengaturan diri melibatkan beberapa cara seperti menjaga disiplin diri, memikirkan diri sendiri,

³³ Thomas Lemke, "Foucault, Governmentality, and Critique," in *Journal of Economics, Culture and Society*, vol. 14, 2002, <https://doi.org/10.1080/089356902101242288>.

mengevaluasi kehidupan, dan memenuhi tanggung jawab pribadi. Individu didorong agar sadar akan apa yang dilakukannya, mampu mengendalikan perasaan dan hasratnya, serta memperbaiki tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diakui oleh masyarakat. Dalam proses ini, seseorang belajar bagaimana mengelola hidupnya sendiri.³⁴

Pengaturan diri bukan hanya soal psikologis, tapi juga proses politik. Kekuasaan bekerja dengan menciptakan individu yang mampu mengendalikan diri sendiri tanpa selalu memerlukan pengawasan dari pihak luar. Kontrol tidak lagi dilakukan dengan cara mengawasi langsung, melainkan melalui rasa sadar dalam diri seseorang yang membuatnya merasa harus taat, produktif, dan bertanggung jawab.³⁵

Dalam buku *The Birth of Biopolitics*, Foucault menjelaskan bahwa cara berpikir pemerintahan modern membentuk individu yang terlihat seperti bisa berdiri sendiri, bebas mengambil keputusan, dan tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Namun, otonomi itu sebenarnya lahir dari proses sosial yang berlangsung lama. Individu diminta untuk berpikir dan bertindak berdasarkan logika tertentu yang telah disematkan

³⁴ Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 15–28.

³⁵ Foucault, *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*.

melalui berbagai institusi dan praktik sosial. Dengan demikian, teknik pengaturan diri menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui paksaan, tetapi melalui pembentukan subjek yang secara sukarela menerapkan logika kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

2. Pembinaan Moral dan Sosial (*Moral and Social Formation*)

Dimensi kedua dalam *governmentality* melihat bagaimana pembentukan nilai-nilai moral dan kepribadian seseorang. *Governmentality* tidak hanya mengatur cara orang berperilaku, tetapi juga membentuk identitas, nilai, serta cara orang memahami dirinya sendiri. Dalam pandangan Foucault, individu bukanlah sesuatu yang sudah pasti dari awal, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan sejarah yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan.³⁷

Melalui cara normalisasi, masyarakat membentuk ketentuan mengenai apa yang dianggap sebagai hal yang biasa, wajar, sehat, masuk akal, berproduktivitas, dan memiliki nilai moral. Standar-standar tersebut kemudian diterima oleh individu sebagai bagian dari identitas dirinya sendiri. Individu mulai menilai dirinya sendiri berdasarkan kategori-

³⁶ Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979*, 269–271.

³⁷ Foucault Michel, 311–313.

kategori itu dan menganggap keberhasilan atau kegagalan dalam hidup sebagai tanggung jawab yang harus ditanggung sendiri.

Pembentukan moral ini membuat kekuasaan bekerja dengan cara yang lembut dan tidak terlihat. Individu tidak merasa sedang diawasi, melainkan merasa sedang mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Kontrol dari luar diganti dengan kontrol dari dalam, sehingga seseorang menjadi pengawas atas dirinya sendiri. Proses ini menciptakan subjek yang berkeinginan sendiri untuk mematuhi aturan tanpa harus dipaksa langsung oleh pihak berwenang.

Subjektivitas yang dihasilkan oleh *governmentality* bersifat politis karena identitas seseorang selalu terkait dengan proyek kekuasaan tertentu. Individu dilatih agar menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, produktif, dan sanggup mengatur diri sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, *governmentality* tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga membentuk identitas sosial yang sesuai dengan cara berpikir dan mengatur kekuasaan.³⁸

³⁸ I Putu Rai Sukmaning Wahyu et al., "Praktik Governmentality Dan Nativisme Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali," *Politika Udayana* 1, no. 2 (2021): 15.

3. Rasionalitas Kebijakan (*Policy Rationality*)

Dimensi ketiga dalam *governmentality* adalah rasionalitas kebijakan. Dimna Foucault menekankan bahwa setiap praktik kekuasaan selalu didasari oleh cara berpikir tertentu yang membuat praktik tersebut terasa masuk akal, wajar, dan sah. Rasionalitas pemerintahan adalah cara berpikir yang menentukan bagaimana manusia dipahami, bagaimana masalah sosial dijelaskan, serta bagaimana solusi dibuat.

Dalam *governmentality*, persoalan tentang masyarakat dianggap sebagai isu teknis yang bisa diukur, dikategorikan, dan dikelola. Masalah sosial kini tidak lagi dilihat hanya sebagai isu politik atau struktural, tetapi dianggap sebagai masalah manajemen yang memerlukan tindakan yang berpikir secara rasional. Kehidupan sosial dianggap sebagai sesuatu yang perlu diatur secara efisien dan terstruktur dengan rapi.

Rasionalitas ini sangat tergantung pada hasil produksi pengetahuan ilmiah. Ilmu-ilmu seperti sosial, ekonomi, statistik, psikologi, dan demografi sangat membantu pemerintah dalam memahami kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan itu kemudian digunakan untuk membuat berbagai jenis intervensi sosial. Oleh karena itu, pengetahuan bukanlah sesuatu

yang netral, melainkan bagian penting dari mekanisme kekuasaan itu sendiri.

Government memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya berjalan melalui lembaga politik resmi, tetapi juga melalui sistem pengetahuan yang menentukan cara kita memahami kehidupan sosial. Cara orang memahami masalah sosial, dan dirinya sendiri selalu tergantung pada pengetahuan yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan.³⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Tania Murray Li (2007), *governmentality* biasanya bersifat anti-politik, karena cenderung mengubah isu-isu struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pergeseran sosial menjadi isu teknis yang bisa diatasi melalui tindakan administratif dan manajerial. Dalam kerangka ini, masalah sosial tidak lagi dilihat sebagai akibat dari hubungan kekuasaan atau struktur ekonomi-politik yang tidak seimbang, melainkan dianggap sebagai masalah perilaku seseorang, kemampuan individu, serta kurangnya pemahaman. Akibatnya, solusi yang diberikan lebih fokus pada perubahan cara berpikir, pembentukan kesadaran, dan peningkatan kemampuan seseorang, bukan pada perubahan struktur sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan cara kerja

³⁹ Sebastianus Geradus Duminggu, "Governmentality Kementerian Desa Pdt dalam Regulasi Penyaluran Bltdd."

rasionalitas pemerintahan dengan menghilangkan politik dari isu sosial dan mengalihkannya ke bidang teknokratis.⁴⁰

Hal yang sama terlihat dimana *Governmentality* memungkinkan kita memahami bahwa peran para aktor sosial tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan norma dan pertimbangan moral. Mereka tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga membantu orang-orang memahami diri mereka sendiri, mengevaluasi tindakan mereka, serta memahami tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam proses ini, seseorang diajak untuk menjadi orang yang disiplin, aktif, dan bisa menanggung tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dengan demikian, *governmentality* berjalan dengan menciptakan subjektivitas, yaitu membentuk individu agar secara sukarela mengelola dirinya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan yang berlaku.⁴¹

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, bentuk kekuasaan seperti ini disebut sebagai kekuasaan yang bersifat produktif. Kekuasaan kini tidak lagi terutama bekerja melalui larangan, hukuman, atau represi, melainkan melalui pembentukan kesadaran, penanaman norma di dalam diri, dan pengaruh pada perilaku seseorang. Individu tidak merasa seperti sedang diawasi, tetapi justru merasa

⁴⁰ Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007), 7–9.

⁴¹ Purwowibowo, *Pembangunan Sosial* (Jakarta Selatan: PT Melvina Media Indonesia, 2018), 49–52.

sedang mencoba memperbaiki diri sendiri. Kontrol dari luar digantikan oleh kontrol dari dalam, sehingga seseorang menjadi pengawas atas dirinya sendiri. Ini adalah alasan mengapa *governmentality* menjadi bentuk kekuasaan yang sangat efektif, karena beroperasi secara halus dan dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan sosial.⁴²

Maka teori *governmentality* memberikan kerangka analisis yang tajam untuk memahami teknologi kekuasaan yang bertujuan membentuk individu agar mampu mengelola dirinya sendiri. Proses ini mencakup edukasi, motivasi, evaluasi, dan pembinaan moral yang mendorong perubahan perilaku serta peningkatan kapasitas individu. Keberhasilan praktik ini tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi dari sejauh mana individu mampu menginternalisasi nilai-nilai tertentu seperti tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian. Dengan demikian, intervensi sosial tidak semata-mata berorientasi pada distribusi sumber daya, tetapi pada pembentukan etos hidup yang dianggap ideal dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, teori *governmentality* memberikan kerangka analisis yang tajam untuk memahami bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui praktik sosial sehari-hari. Kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui hukum dan kebijakan formal, tetapi melalui serangkaian teknik

⁴² Aris Sarjito, "Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Angka Kemiskinan," *Ilu Sosial Dan Politik* 6, no. 2 (2023): 1–12.

pembinaan, edukasi, pelatihan, dan pengawasan sosial yang membentuk cara individu berpikir dan bertindak. *Governmentality* menegaskan bahwa kekuasaan modern tidak bersifat tunggal dan tertutup, melainkan selalu dinegosiasikan dalam praktik, sehingga di dalamnya selalu terdapat ruang bagi adaptasi, reinterpretasi, dan resistensi dari subjek yang terlibat.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan pemaknaan fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap praktik pendampingan sosial yang mereka lakukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas sosial secara langsung berdasarkan pengalaman informan terkait praktik pendampingan, relasi sosial, serta proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan program secara administratif, tetapi juga bagaimana fasilitator memaknai peran mereka sebagai pelaksana kebijakan

⁴³ Prabowo Setyo Nugroho, "Kemiskinan Tetap Menjadi Tantangan Struktural Yang Kompleks Bagi Indonesia. Meskipun Berbagai Upaya Telah Dilakukan, Tingkat," : : *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10, no. 11 (2025).

sosial yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima bantuan.⁴⁴

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam praktik pendampingan PKH secara sistematis, mendalam, dan kontekstual. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan berfokus pada proses sosial, interaksi, serta makna yang muncul dari pengalaman para fasilitator PKH di Kabupaten Bangka Barat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana fasilitator menjalankan fungsi pendampingan, pembinaan, pengawasan, hingga proses pembentukan kesadaran sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan PKH dijalankan melalui praktik-praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat penerima bantuan.⁴⁵

Metode penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang muncul dalam praktik pendampingan PKH. Dalam penelitian ini, praktik pendampingan dipahami tidak hanya sebagai bentuk penyaluran bantuan sosial, tetapi

⁴⁴ Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, 6-10.

⁴⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Rineka Cipta, 2008).

juga mencakup proses pembinaan, pengawasan, dan upaya mendorong perubahan perilaku sosial pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan agar peneliti dapat menggambarkan secara detail bagaimana fasilitator program keluarga harapan (PKH) menafsirkan, menerapkan, serta menghadapi dinamika kekuasaan kebijakan serta pengentasan kemiskinan di lapangan.⁴⁶

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian atau observasi lapangan di lokasi penelitian menggunakan pedoman yang telah dirancang. Data primer didapatkan langsung melalui hasil wawancara mendalam yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dengan delapan fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat terhadap informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program PKH, guna melihat secara langsung praktik

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 361–66.

pendampingan serta dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal.

- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai bentuk data yang telah tersedia. Data sekunder biasanya diperoleh lebih banyak berupa data statistik atau data yang telah diolah sehingga siap untuk digunakan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan PKH, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan sosial program keluarga harapan atau yang terkait dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. diperoleh.⁴⁷

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) dan fasilitator PKH yang aktif di lapangan. Secara keseluruhan, jumlah informan akhir dalam penelitian ini adalah sembilan orang, yang terdiri dari satu orang koordinator kabupaten PKH dan tujuh orang

⁴⁷ Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian Kualitatif* (Universitas Esa Unggul, 2020), 20–26.

fasilitator PKH, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.⁴⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara menjadi salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh sebuah data penelitian. Dalam proses wawancara ini terjadi interaksi atau tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai baik secara langsung ataupun tidak langsung. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara terbuka agar peneliti dapat menggali pengalaman dan persepsi fasilitator secara lebih luas.⁴⁹ Teknik ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana fasilitator memaknai kebijakan PKH, menghadapi kendala di lapangan, serta berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat.

Proses dimulai dengan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat untuk meminta izin melakukan penelitian terkait Program Keluarga Harapan

⁴⁸ Jhon W. Creswel, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat* (Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2021), 35–46.

⁴⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 89.

(PKH). Setelah memperoleh izin, peneliti melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menentukan informan dan mengatur jadwal wawancara. Proses wawancara dilakukan secara semi terstruktur melalui tanya jawab secara langsung dengan koordinator sosial, administrator pangkalan data, dan pendamping PKH di Kabupaten Bangka Barat guna memperoleh data mengenai praktik pendampingan, pelaksanaan kebijakan, serta bentuk governmentality dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1. 1 Hasil Wawancara

Informan	Waktu dan Tempat	Jumlah	Informasi yang Didapat
Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bangka Barat	Kantor Dinas Sosial dan lokasi pendampingan PKH di Kabupaten Bangka Barat	8 Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat. 2. Mengetahui peran fasilitator dalam praktik pendampingan sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 3. Mengetahui bentuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan fasilitator PKH.

			<p>4. Mengetahui pengalaman fasilitator dalam menghadapi dinamika sosial selama proses pendampingan.</p> <p>5. Mengetahui bentuk relasi antara fasilitator, pemerintah, dan masyarakat penerima bantuan sosial.</p> <p>6. Mengetahui pemaknaan fasilitator terhadap praktik pendampingan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH).</p> <p>7. Mengetahui proses pembentukan kesadaran sosial dan perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM).</p>
--	--	--	--

Observasi Teknik observasi (*observation*) merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi dilapangan.

Peneliti melakukan observasi lapangan menggunakan observasi nonpartisipan untuk mengamati langsung kegiatan yang dilakukan fasilitator, seperti sesi pendampingan keluarga (*Family Development Session*), proses sosialisasi kebijakan, dan interaksi antara fasilitator dengan penerima manfaat. Melalui observasi, peneliti memperoleh semua hasil pengamatan dicatat sebagai rekaman pengamatan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat sebagai *cross-check* terhadap data yang diperoleh tentang dinamika sosial yang tidak selalu dapat terungkap dalam wawancara.⁵⁰

Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung proses pendampingan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat. Peneliti mengamati kegiatan pendampingan, pertemuan kelompok, serta interaksi antara pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas pendamping dalam menjalankan tugasnya sehingga peneliti memperoleh data tambahan yang mendukung hasil wawancara dan penelitian.

⁵⁰ R. Raco., Dr. J. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Gramedia Widiansarana Indonesia, 2010.

Tabel 1. 2 Hasil Observasi

Waktu Observasi	Tempat	Kegiatan	Hasil Observasi
08 Januari 2026	Kecamatan Simpang Teritip	Pertemuan pendamping PKH	Proses koordinasi dan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
12 Januari 2026	Kecamatan Kelapa	Kegiatan pendampingan PKH	Interaksi pendamping PKH dalam memberikan arahan dan edukasi kepada KPM.
14 Januari 2026	Kecamatan Tempilang	Observasi kegiatan PKH	Pelaksanaan pendampingan dan kondisi masyarakat penerima bantuan PKH.
19 Januari 2026	Kecamatan Parittiga	Pertemuan kelompok PKH	Penyampaian informasi program dan kegiatan kelompok KPM.
22 Januari 2026	Kecamatan Jebus	Observasi pendampingan PKH	Aktivitas monitoring dan evaluasi pendamping terhadap KPM PKH.
27 Januari 2026	Kecamatan Mentok	Kegiatan pertemuan KPM	Proses pendampingan dan penyampaian materi Program Keluarga Harapan (PKH).

Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menelusuri praktik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat secara lebih mendalam. Dokumentasi tidak hanya dipahami sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai bentuk representasi dari mekanisme dalam praktik pendampingan. Dokumen-dokumen seperti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), laporan kegiatan pendampingan, catatan *Family Development Session* (FDS), data graduasi KPM, pedoman teknis PKH, hingga administrasi evaluasi program menjadi sumber penting dalam membaca bagaimana negara mengatur, mengawasi, sekaligus membentuk perilaku masyarakat miskin melalui program bantuan sosial.

Melalui dokumentasi tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana praktik pendampingan dijalankan tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang menuntut kedisiplinan, kepatuhan, dan perubahan perilaku KPM sesuai dengan rasionalitas program. Dokumentasi juga membantu peneliti untuk menghubungkan hasil wawancara para pendamping PKH dengan realitas administratif yang ada di lapangan, sehingga analisis penelitian tidak hanya bertumpu pada narasi informan, tetapi diperkuat oleh data tertulis dan bukti empiris lainnya.

Selain itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai bagian dari validitas data penelitian, seperti pengambilan foto kegiatan pendampingan, kunjungan rumah KPM, proses verifikasi data, maupun aktivitas sosial lainnya yang berkaitan dengan praktik pendampingan keluarga harapan (PKH). Kehadiran dokumentasi dapat membantu peneliti dalam membangun analisis yang lebih komprehensif mengenai praktik *governmentality* dalam PKH, sekaligus melengkapi sistematika penelitian.⁵¹

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bertujuan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian melakukan pengelompokan kedalam beberapa kategori tertentu lalu menjelaskan kepada bagian sintesa dan menyusun data dengan memilih mana yang akan dipelajari. Sehingga data dapat dianalisis dengan jelas, lalu bisa memperoleh kesimpulan untuk membantu memudahkan pemahaman bagi penulis dan memudahkan orang lain untuk mencari sumber informasi.

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 156.

- a. Tahap Reduksi Data. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.
- b. Tahap penyajian data dilakukan Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk teks naratif agar data tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Data yang diperoleh dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat disajikan berdasarkan pola, hubungan, serta tema-tema penelitian, seperti praktik pendampingan, relasi antara pendamping dan KPM, bentuk pengawasan program, serta proses pembentukan kesadaran sosial KPM. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi dalam praktik PKH sekaligus melihat keterkaitan antara temuan

lapangan dengan konsep governmentality dan subjektivasi yang digunakan dalam penelitian.

Proses penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian ke dalam uraian kalimat yang terstruktur sehingga memudahkan pembaca memahami hasil penelitian secara lebih jelas. Selain dalam bentuk naratif, beberapa data juga disajikan dalam bentuk tabel, seperti profil informan, kategorisasi temuan penelitian, serta bentuk praktik pendampingan PKH di lapangan. Pola penyajian tersebut membantu peneliti melihat hubungan antar kategori data yang saling berkaitan sehingga analisis penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.

- c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan data, informasi, dan temuan lapangan dengan fokus serta rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan yang diperoleh pada awal penelitian masih bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dan saling mendukung.

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan dikaitkan dengan fokus penelitian mengenai praktik *governmentality* dan proses subjektivasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat. Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan data dan informasi yang telah menunjukkan konsistensi, memiliki bukti yang valid, serta sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan kredibel.⁵²

5. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan untuk melakukan *Croscek* dengan cara membandingkan hasil wawancara dari beberapa fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat untuk melihat kesesuaian informasi yang diberikan. Peneliti tidak hanya mengambil data dari satu informan, tetapi membandingkan jawaban antar fasilitator agar data yang diperoleh lebih jelas dan dapat dipercaya. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan

⁵² Jhon Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2019), 2–5.

melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tetap konsisten. Selain itu, hasil wawancara juga diperkuat melalui observasi dan dokumentasi kegiatan pendampingan PKH di lapangan.⁵³

Melalui proses tersebut, peneliti dapat memahami dan menyesuaikan data yang diperoleh dengan fokus serta rumusan masalah penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipelajari dan dianalisis secara bertahap untuk melihat hubungan antar temuan mengenai praktik governmentality dan proses subjektivasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi di lapangan secara lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mengandung urutan-urutan dan penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam penulisan. Peneliti akan memaparkan bagian-bagian penting dari setiap bab dalam penelitian.

⁵³ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 40–53.

Bab pertama berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, serta metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman, pemaknaan, dan persepsi para fasilitator terkait praktik kekuasaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari perspektif governmentality. Seluruh komponen dalam bab ini disusun untuk memberikan dasar konseptual dan metodologis bagi penelitian sehingga arah analisis menjadi jelas dan terstruktur.

Bab kedua, ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yang pertama meliputi pemaparan data tentang lokasi kabupaten Bangka Barat .Yang kedua, meliputi Latar belakang PKH, Rancangan Kegiatan PKH, Skema Bantuan PKH.

Bab ketiga, penyajian data, pada bab ini membahas tentang persepsi fasilitator PKH terhadap praktik kekuasaan dalam Program Keluarga Harapan perspektif governmentality di Kabupaten Bangka Barat, meliputi bentuk-bentuk praktik kekuasaan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, pengalaman fasilitator dalam menjalankan tugas pendampingan, serta dinamika relasi kuasa antara fasilitator dan KPM yang teridentifikasi selama proses pendampingan.

Bab keempat merupakan analisis data yang telah diperoleh dari persepsi fasilitator PKH terhadap praktik kekuasaan dalam Program Keluarga Harapan perspektif governmentality pada bab tiga, kemudian dianalisis menggunakan perspektif governmentality untuk memahami bagaimana relasi kuasa, mekanisme pengelolaan perilaku, dan strategi pendampingan dijalankan oleh fasilitator dalam struktur program.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian mengenai persepsi fasilitator terhadap praktik kekuasaan dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Barat serta saran bagi pengembangan pendampingan PKH dan penelitian selanjutnya agar pemahaman mengenai relasi kuasa dalam konteks program sosial semakin komprehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diadakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada keluarga yang miskin dan rentan. Program ini dijalankan melalui mekanisme bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*), yang memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat dengan syarat memenuhi komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH berlandaskan hukum dalam kebijakan kesejahteraan sosial, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta berbagai peraturan turunan seperti peraturan Menteri Sosial yang mengatur pelaksanaan program tersebut.

Program ini dilaksanakan pada tahun 2007 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Seiring berjalannya waktu, jumlah penerima manfaat dan dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PKH semakin bertambah. Program ini mencakup jutaan keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber data

utama dalam menentukan penerima bantuan sosial. Melalui inisiatif ini, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga dengan memastikan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta agar KPM bisa mandiri kedepannya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan berbagai aktor yang bekerja secara berjenjang hingga tingkat lokal. Pada tingkat pusat, program ini dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, serta menyusun pedoman pelaksanaan program. Dalam implementasinya, Kementerian Sosial juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui dinas sosial berperan dalam mendukung pelaksanaan program serta mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Pada tingkat lokal, pelaksanaan program sangat bergantung pada peran fasilitator yang berinteraksi langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fasilitator bertugas melakukan pendampingan, memantau kepatuhan terhadap komponen program, serta memberikan pembinaan kepada KPM agar tujuan program dapat tercapai. Dalam

praktiknya, fasilitator tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat. Melalui interaksi secara langsung dengan KPM, fasilitator menjadi aktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat penerima manfaat.

Penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap peran fasilitator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam implementasi program, fasilitator menempati posisi penting karena mereka berinteraksi secara langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kegiatan pendampingan, pemantauan kepatuhan terhadap komponen program, serta pembinaan kepada KPM. Melalui aktivitas tersebut, fasilitator menjadi pihak yang menjalankan kebijakan negara di tingkat lokal sekaligus menerjemahkan tujuan program ke dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat penerima manfaat.

Dalam tahap pendampingan, fasilitator tidak hanya memastikan bahwa KPM memenuhi tanggung jawab program seperti aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berusaha mendorong perubahan sikap pada keluarga penerima manfaat. Melalui kegiatan pembinaan dan interaksi dengan KPM, fasilitator berperan untuk mengarahkan KPM agar lebih memerhatikan pendidikan anak, kesehatan seluruh anggota keluarga, serta pengelolaan rumah tangga

yang baik. Oleh karena itu, fasilitator memiliki peranan penting dalam membantu mencapai sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membentuk keluarga yang lebih mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana fasilitator memahami dan memaknai tugas yang mereka jalankan dalam proses pendampingan KPM. Penelitian ini juga melihat bagaimana fasilitator memaknai tujuan program untuk membentuk keluarga yang mandiri. Dalam kerangka PKH, kemandirian keluarga tidak hanya dipahami dalam aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan kehidupan keluarga. Melalui kegiatan pendampingan, fasilitator berperan dalam menyampaikan tujuan program sekaligus mendorong KPM untuk lebih aktif memanfaatkan layanan sosial yang tersedia.

Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana fasilitator menjalankan peran sebagai penghubung antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan PKH, berbagai aturan dan standar kepatuhan ditetapkan oleh negara sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Namun dalam praktik di tingkat lokal, fasilitator menjadi pihak yang menjelaskan serta menerapkan kebijakan tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat penerima manfaat.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *governmentality* yang melihat bahwa praktik kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan formal, tetapi juga melalui berbagai mekanisme yang membentuk perilaku masyarakat. Dalam konteks PKH, praktik tersebut terlihat melalui proses pendampingan, pembinaan, serta pemantauan kepatuhan terhadap komponen program yang dijalankan oleh fasilitator sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan sosial.

Temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melibatkan praktik pendampingan yang dijalankan oleh fasilitator kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fasilitator menjadi aktor utama yang berinteraksi langsung dengan KPM melalui kegiatan pendataan, pemantauan kepatuhan program, pembinaan, serta evaluasi program. Melalui berbagai aktivitas tersebut, fasilitator berperan sebagai penghubung antara kebijakan negara dan kehidupan masyarakat penerima manfaat.

Dalam praktik pendampingan, fasilitator menjalankan berbagai peran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan sosial. Fasilitator berperan sebagai edukator yang memberikan pembinaan kepada KPM melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), kunjungan

rumah, serta komunikasi langsung dengan keluarga penerima manfaat. Melalui kegiatan tersebut, fasilitator menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta pengelolaan kehidupan rumah tangga. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KPM mengenai kewajiban program sekaligus mendorong perubahan perilaku yang sejalan dengan tujuan PKH.

Selain sebagai edukator, fasilitator juga berperan sebagai motivator yang mendorong KPM untuk menjalankan kewajiban program serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan keluarga. Fasilitator tidak hanya menyampaikan aturan program, tetapi juga memberikan dukungan dan motivasi agar KPM dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka secara bertahap. Di sisi lain, fasilitator juga menjalankan fungsi advokasi dengan membantu KPM mengakses berbagai layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta program bantuan lainnya melalui koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa data menjadi instrumen penting dalam praktik pendampingan. Melalui proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan informasi mengenai kondisi KPM, fasilitator dapat memantau perkembangan keluarga penerima manfaat serta menentukan status kepesertaan mereka dalam program. Data tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga

memperkuat posisi fasilitator dalam menjelaskan aturan program dan mengambil keputusan terkait evaluasi kepesertaan KPM.

Sehingga pelaksanaan program, fasilitator juga menghadapi berbagai dinamika dalam mengelola kepatuhan KPM terhadap aturan program. Beberapa KPM pada awalnya memandang PKH hanya sebagai bantuan finansial tanpa memperhatikan kewajiban yang menyertainya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, fasilitator menggunakan berbagai strategi pendampingan seperti edukasi berulang, komunikasi persuasif, serta pendekatan interpersonal yang lebih dekat dengan keluarga penerima manfaat. Melalui pendekatan tersebut, fasilitator berupaya membangun kesadaran KPM agar mereka memahami tujuan program secara lebih luas.

Praktik pendampingan tersebut juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan antara fasilitator dan KPM dalam pelaksanaan program. Fasilitator menempati posisi strategis sebagai pihak yang memahami aturan program sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Posisi ini membuat fasilitator memiliki pengaruh dalam mengarahkan perilaku KPM agar sesuai dengan aturan program. Namun demikian, relasi kekuasaan tersebut tidak selalu dijalankan secara kaku karena fasilitator sering kali menyesuaikan pendekatan pendampingan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Jika dilihat melalui perspektif governmentality, praktik pendampingan dalam PKH menunjukkan bagaimana kekuasaan negara bekerja melalui mekanisme pembinaan, pendampingan, serta pemantauan kepatuhan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui proses tersebut, KPM secara bertahap diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai program seperti pentingnya pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta upaya mencapai kemandirian keluarga.

Dengan demikian, pelaksanaan PKH tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari praktik pemerintahan sosial yang membentuk perilaku masyarakat penerima manfaat. Fasilitator tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis program, tetapi juga sebagai aktor yang menerjemahkan kebijakan negara dalam praktik sosial di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa fasilitator dalam Program Keluarga Harapan mewujudkan dirinya sebagai bentuk tindakan kekuasaan yang beroperasi melalui proses pengendalian diri atau subjektivasi. Dalam perspektif Foucault subjektivasi dipahami sebagai proses di mana individu membentuk dirinya sebagai subjek melalui internalisasi norma, nilai, dan praktik yang dihasilkan oleh relasi kekuasaan. Dengan demikian, fasilitator tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga secara aktif membentuk dirinya sesuai dengan kerangka yang ditetapkan program.

Melalui kegiatan pendampingan, fasilitator berupaya mendorong Keluarga penerima Manfaat untuk mengikuti nilai-nilai program dan menyesuaikan perilaku mereka dengan sasaran kebijakan. Namun, praktik kekuasaan ini juga bersifat reflektif, karena fasilitator seringkali menyesuaikan metode pendampingannya tidak hanya berdasarkan panduan program, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan sosial mereka terhadap KPM.

B. Saran

1. Pertama, bagi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya fasilitator, disarankan agar praktik pendampingan tidak hanya berfokus pada pencapaian kepatuhan administratif dan target graduasi, tetapi juga lebih memperhatikan kondisi sosial dan struktural Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji Program Keluarga Harapan dari perspektif yang lebih beragam guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Kajian yang lebih mendalam mengenai relasi antara fasilitator dan Keluarga Penerima Manfaat juga penting untuk melihat bagaimana kebijakan sosial dijalankan dalam praktik sehari-hari.

3. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademis mengenai Program Keluarga Harapan, khususnya dengan menambahkan perspektif teori kritis dalam analisis kebijakan sosial. Pendekatan tersebut dapat membantu memahami bahwa kebijakan bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai praktik pemerintahan yang membentuk perilaku dan kesadaran masyarakat penerima manfaat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Fahrurrazy Muhammad, Safitri Yuli Hartati, Mila Amalia, and Egrina Fauzi. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amalia Adhandayani. *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul, 2020.
- Annas, Aswar, Resky Amalia, and Nursafitra M. *Pelayanan Bantuan Sosial: Social Assistance Services*. Jakarta: Chakti Pustaka Indonesia, 2022.
- Ansori, Agus Zakaria. *Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori, Dan Pemikiran Islam*. Mataram: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2019.
- Arinda Riskiana Putri. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blera," 2023.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat, 15 Februari 2025, Pukul 12.09," n.d. <https://bangkabaratkab.bps.go.id/id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2025." Badan Pusat Statistik Bangka Barat, 2025.
- . "Persentase Penduduk Miskin, Akses 11 Februari," 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/per>

sentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html.

Baihaqi. *Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan (Dari Teori Hingga Empirik)*. Jawa Barat: Rumah Cemerlang Indonesia, 2023.

BPS. “Jumlah Pendudukan Kabupaten Bangka Barat.” Badan Pusat Statistik Bangka Barat, 2022. <https://bangkabaratkab.bps.go.id/>.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Rineka Cipta, 2008).

Cahyono, Moch.Fery Dwi. *Potret Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

Creswel, Jhon W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*. Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2021.

Damanik, Fritz Hotman S, Syasya Yuania, Fadila Mas, Hamdan Nafiatur Rosyida, Nunung Hastika Adiwidjaja, and Nadya Kharima. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025.

Darajat, Anwar Hakim, and Septa Ekasari. “Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar).” *Jurnal Translitera* 10, no. 1 (2021): 8–14. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

Dean, Mitchell. *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. London: Sage Publications, 2010.

Dinkes. “Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.” Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, 2021. <https://dinkes.bangkabaratkab.go.id/>.

- Dirgantari, Atifa Iin. “Efektivitas Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.” Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Dispora. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.” Bangka barat: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2024.
- DP3ACSKB. “Agregat Data Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I.” (Pangkalpinang: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025. <https://doi.org/https://dp3acskb.babelprov.go.id/sites/default/files/publikasi/Agregat%20Semester%201%20Thn%2025.pdf>).
- Dwisnu, Erlan, Diherna Yolanda, and Kecamatan Pino. “Implementasi Program Keluarga Harapan Pkh Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Batu Bandung.” *JURNAL STIA BENGKULU:Committe to Administration for Education Qualit* 11, no. 2 (2025): 145–60.
- Faustina, Bernadette, Ellya Susilowati, and Harapan Luban Gaol. “Menggali Peran Pendaming Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi KPM PKH: Studi Kasus Di Kelurahan Kebon Jayanti Kota Bandung.” *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i2.1413>.
- Foucault, Michel. *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*. Amherst: University of Massachusetts Press., 1988.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1977.
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan Sejarah Seksualitas*, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Foucault, Michel. *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979*. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Fraser, Garry. “Foucault, Governmentality Theory and ‘Neoliberal Community Development.’” *Community Development Journal* 55, no. 3 (2020): 437–451. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cdj/bsy049>.

Friedrich Ebert Stiftung. *Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta, 2024.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Habibullah. “Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal* 16, no. 02 (2011): 105–6.

Hadi, Aulia, Soewarsono, Thung Ju Lan, and Wasito raharjo Jati. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, Dan Pola Kerentanan Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2021.

Halimatussa’diah. “Strategi Komunikasi Dalam Pendamping PKH Sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat.” *Ameena Journal* 3 (2025): 25–35.

Hia, Evan Notatema, Matias Siagian, and Nurman Achmad. “Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan Implementation.” *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 128–39. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>.

Izza, Ana Ni‘matul. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Jalilah, Nashrullah, and Maimun. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kesejahteraan Masyarakat.” *Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 34–53.

Kemensos. “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.” Jakarta: Kemeteriam Sosial Republik Indonesia, 2021.

———. “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.” Jakarta Pusat: kementerian Sosial republik Indonesia, 2024.
https://doi.org/https://cloud.asahankab.go.id/dinas-sosial/2025/04/File_-_2024-03-18.pdf.

Kementerian Sosial. “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan,” 2021.

Khoiriyah, Afwa, Susistifaragus, Ryan Rizky, Vika Kartika, Iftinah Helmy, and Ellies Sukmawati. “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).

Kiersey, Nicholas J., and Stokes Doug. *Michael Foucault Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Kumorotomo, Wahyudi, and Yuyun Purbokusumo. *Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Lemke, Thomas. “Foucault , Governmentality , and Critique.” In *Journal of Economics, Culture and Society*, Vol. 14, 2002.
<https://doi.org/10.1080/089356902101242288>.

- Li, Tania Murray. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press, 2007.
- Mahayani, Ni Made Hintya. "Implementasi Kebijakan Sosial Di Masyarakat Marginal: Studi Literatur Tentang Hambatan Dan Strategi Adaptasi." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2024): 181–88.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Michel Foucault. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, Ed. Graham Burchell, Colin Gordon, Dan Peter Miller. Chicago: University of Chicago Press., 1991.
- Midgley, Martin B. Tracy, and Michelle Livermore. *The Handbook of Social Policy*. Thousand Oaks: Sage Publications. Thousand Oaks: Sage Publications, 2000.
- Moleong, Jhon Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad Aqsa Raihan Bukhari. "Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Muhammad Iqbal et al., "Representasi Kekuasaan dan Perlawanan dalam Novel Granada Karya Radwa Ashour : Kajian Hegemoni Antonio Gramsci" 8, no. 2 (2025).
- Naba, Hasfila La, Hartini Amin, and Andi Tenri. "Peran Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Batuawu Kecamatan Siempu Kabupaten Buton Selatan." *Sosiologi Miabhari* 1, no.

Januari (2024): 107–26.

Nadia, Ina, Asep Shodiqin, Luk Luk, and Atin Marfuah. “Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan.” *Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 3 (2024): 245–66.

Nugroho, Prabowo Setyo. “Kemiskinan Tetap Menjadi Tantangan Struktural Yang Kompleks Bagi Indonesia. Meskipun Berbagai Upaya Telah Dilakukan, Tingkat.” : : *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10, no. 11 (2025).

Nuriah, Dyah, Linggar Septiyanti, Abdul Rahmat, and Mohammad Zubaidi. “Peran Pendamping Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan.” *Student Journal of Community Empowerment (SJCE)* 161 2, no. 3 (2022): 161–67.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat.” Bangka Barat: Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, 2023.
<https://doi.org/https://share.google/3NmALs1yeiy9NWoa1>

Prianto, Nopri. “Pelaksanaan Diklat P2K2 Family Development Sesion PKH E-Learning.” Universitas Negeri YOgyakarta, 2020.

Purwanto, Slamet Agus, and M Makmur. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).” *Wacana* 16, no. 2 (2023).

Purwowibowo. *Pembangunan Sosial*. Jakarta Selatan: PT Melvina Media Indonesia, 2018.

R. Raco., Dr. J. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Gramedia Widiansarana Indonesia, 2010.

- Rahmawati, Evi, and Bagus Kisworo. "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2 1, no. 2 (2017): 161–69. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>.
- Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, ed. ke-3 (New York: Penguin Books, 2011).
- Rohman, Muhammad Afif Syaifur, Faizal, and Tantowi Jauhari. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 2066–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.14292>.
- Rose, Nikolas. *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. London: Cambridge University Press, 1999.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Rusidana, A, and Nasihudin. *Peran Pimpinan PTKIS Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNi Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi*. Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- S. Mandjarreki. *Teknik Fasilitasi: Panduan Memfasilitasi Pembelajaran Partisipatif Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Sanjaya, Abih, and Iskandar Zulkarnain. "Praktik Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pelaksanaan Tradisi Festival Kenango Di Kabupaten Bangka." *Jurnal Penelitian Ilmiah*

Multidisipliner 02, no. 02 (2025): 494–509.

Sari, Rati Julia Pita, Tri Purwanti, and Ovita Charolina. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH).” *STIA BENGKULU:Committe to Administration for Education Qualit* 2, no. 2 (2023): 179–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.56135/jsb.v9i2.113>.

Sarjito, Aris. “Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Angka Kemiskinan.” *Il,u Sosial Dan Poitik* 6, no. 2 (2023): 1–12.

Sebastianus Geradus Duminggu. “Governmentality Kementerian Desa Pdttd Dalam Regulasi Penyaluran Bltdd.” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 6, no. 1 (2022): 15–38. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i1.173>.

Shirley, Savetlana, Sukmana Irza, Meizano Muhammad Ardhi, and Afri Yudami. *Ilmu-Ilmu Teknik: Kebencanaan 2019. Lampung: UPT Perpustakaan Universitas Lampung*. Edited by Shirley Savetlana, Irza Sukmana, Meizano Muhammad Ardhi, and Afri Yudamson. Bandar Lampung: UPT Perpustakaan Universitas Lampung, 2019.

Silviana, Dyan, and Nur Wahdatul Chilmy. “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencapai Graduasi Mandiri Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.” *Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024): 133–43.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar, Edisi Revisi Hlm. 71–73*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

Sompie, Maulida Eka Putri, Achmad Aminudin, and Jatmiko Yogopriyatno. “Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut.” *Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* 1, no. 3 (2022): 93–102.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Suharto, Edi, and Djuni Thamrin. "Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa." *Aspirasi* 3, no. 1 (2012): 1–20.
- Wahyu, I Putu Rai Sukmaning, I Ketut Putra Erawan, Anak Agung Sagung Mirah, and Mahaswari Jayanthi Mertha. "Praktik Governmentality Dan Nativisme Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali." *Politika Udayana* 1, no. 2 (2021): 15.
- Wahyudi, Agus. "Kontribusi Pelatihan Pendamping Sosial PKH Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung Untuk Pencegahan Dan Penanganan Stunting." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13, no. 2 (2024): 173–89.
- Wati, Hikmah. "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung." Universitas Muhammadiyah Metro, 2017.
- Wibowo, Arif, and Sari Viciawati Machdum. *Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Kilau Kata, 2023.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita, Rendy Adiwilaga, Izhar Hasanah, Bale Bandung, Jl Raa, Wiranatakusumah No, Kecamatan Baleendah, and Kabupaten Bandung. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangelelang Kabupaten Bandung." *Ilmu Pemerintah Widyah Praja* 46, no. 2 (2020): 396–407. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v>.
- Wijayanto, Adi, Sri Kartikowati, Natsir B Kotten, Riska Latifatul Husna, and Tika Meldina. *Social Science Dan Pembelajaran IPS Dalam Penerapan Di Masyarakat*.

Tulungagung: Akademia Pustaka, 2024.

Yuliani, Asti, Zaenal Abidin, and Sri Kadarsi. *Program Keluarga Harapan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jambi: CV Meriva Media, 2024.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2013.

